

MEMPERKUAT KOMITMEN BERSAMA UNTUK MENEKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA

Kabupaten Minahasa Utara atau biasa disebut Kabupaten Minut merupakan satu kabupaten di Sulawesi Utara yang memiliki letak sangat strategis diantara dua kota, yaitu Manado dan Bitung.

Kabupaten hasil pemekaran yang berdiri pada tahun 2003 ini memiliki jumlah penduduk hingga 188.904 jiwa. Secara administratif kabupaten ini terdiri dari 10 kecamatan, 118 desa dan 6 kelurahan dengan Ibukota kabupaten di Airmadidi.

Kabupaten ini terdiri atas wilayah daratan dan juga beberapa pulau kecil di sekitarnya.

Masalah, tantangan atau peluang

Berdasarkan data BPS Kabupaten Minut tahun 2011, jumlah penduduk usia sekolah untuk tingkat SMP/MTs berjumlah 10.289 jiwa, diantaranya 1.555 anak yang putus sekolah atau tidak sekolah

Pada awal tahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Minut dengan dukungan BASICS melakukan survei ke masyarakat di lima kecamatan daerah pesisir dan kepulauan untuk mengetahui faktor penyebab anak putus sekolah. Hasil survei menemukan 350 (219 laki-laki, 131 perempuan) anak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang tidak lagi bersekolah. Jelaslah bahwa ada masalah ketimpangan gender: ada perbedaan cukup besar pada pengalaman bersekolah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Penyebab utama putus sekolah yang dilaporkan responden survei antara lain: masalah ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan serta situasi sekolah. Banyaknya anak laki-laki yang putus sekolah disebutkan akibat lebih memilih untuk mencari uang untuk membantu kehidupan keluarga dan sebagian kecil karena terpengaruh lingkungan pergaulan. Sementara hampir semua anak perempuan yang putus sekolah menyatakan dikarenakan kesulitan ekonomi yang mengakibatkan orang tua menghimbau anaknya untuk cukup menamatkan SD atau putus sebelum menamatkan SMP.

Langkah yang telah diambil

- 1** Menyikapi hasil temuan tersebut, pada tanggal 2 Mei 2012 diselenggarakan sebuah pertemuan besar dengan tajuk Ikrar Pencanangan Gerakan Sumikolah (“kembali ke sekolah”), dibacakan oleh Ketua DPRD dengan disaksikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) serta stakeholder pendidikan, termasuk perwakilan dari dunia usaha di Minahasa Utara dan organisasi masyarakat sipil. Bupati menyebutkan bahwa penanganan anak putus sekolah merupakan tanggung jawab semua pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat pada umumnya serta pihak swasta. Hal ini dipandang penting dapat didukung oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di kabupaten tersebut sebagai bentuk pertanggung gugatan sosial perusahaan pada lingkungan masyarakat di sekitarnya.
- 2** Gerakan Sumikolah kemudian diterjemahkan menjadi Program Sumikolah yang terbagi atas **empat langkah utama**, yaitu: **pertama**, survei pendidikan langsung ke masyarakat; **kedua**, kunjungan konseling dari rumah ke rumah; **ketiga**, monitoring layanan sekolah dan perkembangan anak yang telah kembali ke sekolah, dan **keempat**, pengembangan sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan kebutuhan anak sekolah dari keluarga tidak mampu.
- 3** Dalam hal **survei pendidikan**, digunakan pendekatan yang sangat mudah dan data yang ditemukan praktis untuk digunakan. Pelaksanaan kegiatan ini menekankan pada semangat kolaborasi, misalnya antara Dinas Dikpora dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari Minut dan Kota Manado termasuk Dewan Pendidikan Kabupaten Minut, dalam menyusun instrumen pendataan, penggalan data di lapangan, penyusunan analisis temuan dan pembuatan laporan.
- 4** **Kunjungan dari rumah ke rumah** anak putus sekolah bertujuan untuk mendorong anak-anak putus sekolah kembali bersekolah. Staf Dinas Dikpora dan OMS memberikan penyuluhan dan konseling pada orang tua dan anak dengan membicarakan berbagai solusi yang memungkinkan anak tetap mendapatkan pendidikan tanpa menjadi beban bagi orang tua. Sebagai sebuah stimulan, Dikpora melalui dukungan BASICS pada tahun 2012 menyiapkan peralatan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu jika kembali ke sekolah. Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab orang tua dan anak putus sekolah tersebut dibuat sebuah surat pernyataan yang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa setempat
- 5** Guna memastikan anak yang kembali ke sekolah dapat menyelesaikan masa sekolah, dilakukan **monitoring berkala oleh pengawas sekolah** sebagai tugas yang melekat bagi jabatannya. Pada prakteknya, kegiatan ini melibatkan juga pemerintah desa setempat, Dewan Pendidikan serta komite sekolah.
- 6** Guna memperkuat **dukungan pendanaan** dari pihak swasta ataupun pihak lain yang peduli pada urusan pendidikan, BASICS juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan Dinas Dikpora dengan pihak swasta ataupun pihak lain yang berminat berkontribusi menjadi 'orang tua asuh'.

Dampak dan Perubahan

- Opini terus bergulir di kalangan pemerintah daerah untuk menuntaskan tantangan anak putus sekolah. Ikrar yang disampaikan Bupati dan Ketua DPRD memberikan pengaruh sekaligus arahan bagi pimpinan instansi pemerintah daerah lain untuk mengembangkan program yang mendukung Ikrar Sumikolah. Contoh: Dikpora telah mengajukan usulan program dan anggaran daerah untuk tahun 2012 untuk membangun Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan beberapa kegiatan lain yang mendukungnya di daerah pesisir dan pulau. Malah pemerintah daerah telah berjanji akan menerapkan Program Sumilokah pada semua kecamatan di kabupaten Minut selain kelima kecamatan awal.
- Pertemuan-pertemuan Dinas Dikpora dengan pihak swasta dan pihak sponsor lain juga mulai menuai hasil. Sumbangan dana sebesar Rp. 288 juta dari Kerukunan Perempuan Tonsea dan alokasi dana sebesar Rp. 29 juta dari perusahaan MSM (Meares Sopotan Mining) merupakan satu bukti nyata. Pada akhir tahun 2012, Pertamina juga sudah menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan atas hal tersebut.
- Pada level masyarakat sebanyak 220 anak putus sekolah telah menyatakan bersedia untuk kembali bersekolah pada tahun ajaran baru tahun 2013. Sebagai bentuk komitmen yang mengikat, orang tua dan siswa bersangkutan telah menandatangani surat pernyataan yang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa setempat.

Evaluasi dampak dan perubahan tersebut memang masih prematur dan masih perlu dikembangkan untuk dapat menunjang keberlanjutannya. Tantangan-tantangan baru dari dampak tersebut mulai muncul untuk diselesaikan, seperti: bagaimana sistem dan pengelolaan sumber dana bantuan swasta dan pihak lain dalam mendukung orang tua asuh, bagaimana mengoptimalkan peran OMS secara berkelanjutan, serta bagaimana memastikan jaminan alokasi anggaran rutin yang dapat mendukung Program Sumikolah selanjutnya.



Pembelajaran

Beberapa hal yang dapat ditarik sebagai pembelajaran dari inisiatif yang dikembangkan di Kabupaten Minahasa Utara adalah:

- Inisiatif yang dibangun dengan mendorong pelibatan aktif pimpinan daerah akan berdampak lebih luas bagi pelaksanaan pelayanan.
- Pendekatan yang efektif dalam menangani tantangan di bidang pelayanan publik memerlukan sinergi nyata berupa komitmen antar sejumlah pihak, bukan hanya instansi pemerintah, untuk bekerja bersama-sama sesuai peran, minat, tanggungjawab dan rasa keadilan masing-masing.
- Inisiatif yang dikembangkan perlu didukung dengan upaya yang menjamin keberlanjutannya, baik berkelanjutan atas dukungan program, anggaran dan kebijakan daerah, maupun keberlanjutan pada sisi mekanisme kontrol dan partisipasi masyarakat serta pihak swasta yang mendukungnya.